

Struktur dan Makna dalam Model Historiografi Radikalisme Islam di Minangkabau Abad ke-19: Sebuah Refleksi

Yudhi Andoni*

Afiliasi: Universitas Andalas / Departemen Sejarah, Padang, Indonesia

Email: yudhiandoni@hum.unand.ac.id*

Informasi artikel: Naskah diterima: 7 Januari; Revisi: 22 Februari;
Disetujui: 28 Maret 2022.

Abstrak

Model merupakan salah satu wujud struktur menjelaskan fenomena dalam ilmu pengetahuan, terutama pada paradigma sosial-budaya yang membentuk makna. Hampir seluruh model historiografi Indonesia yang diproduksi tentang masa ini mengesankan bahwa seluruh orang-orang Minangkabau yang hidup dalam tradisi Surau merupakan pengikut Padri atau paham Wahabisme yang tidak toleran terhadap adat istiadat setempat. Artikel ini bertujuan memberikan gambaran satu model historiografi sebagai legitimasi pemaknaan proses radikalisme yang melanda kaum ulama Surau di Minangkabau sejak awal abad ke-19, yang menunjukkan peran keberadaan gagasan kolonialisme di dalamnya. Kesimpulan artikel ini menunjukkan bahwa berbagai karya historiografi sepanjang kurun pasca Perang Padri sampai hari ini telah membentuk satu model historiografi bermakna pseudo-kritis. Historiografi model ini dibentuk oleh paradigma historiografi Indonesia-sentrisme, konsumerisme akademik, dan pewacanaan kebangsaan.

Key words: makna, model, historiografi, radikalisme, Islam di Minangkabau

Model merupakan salah satu wujud struktur menjelaskan fenomena dalam ilmu pengetahuan, terutama pada paradigma sosial-budaya yang membentuk makna (Ahimsa-Putra, 2011). Menurut Ferdinand de Saussure struktur melahirkan makna melalui jejak-jejak tanda yang ditunjukkan dalam berbagai simbolisasinya. Tanda dalam hal ini dapat dikenali melalui simbol penanda dan petanda (Fanani, 2013). Tesis struktur dan makna melalui tanda-tanda ini akan dilihat dalam memahami eksplanasi fenomena kebudayaan, seperti pada konstruksi ruang masyarakat Timor-Barat (McWilliam, 2006), menjadi Amerika dengan rasa Jepang

(Yoshimi, 1998), serta memilih menjadi Indonesia dengan pilihan kreatif (Farid, 2017).

Bagaimana makna dibentuk oleh tanda dalam konstruksi ruang budaya suku Atoni Meto, menjadi Amerika dengan rasa Jepang, dan menjadi Indonesia melalui pemilihan Bahasa Indonesia? Apa yang menjadi tanda dalam produksi makna tersebut; apa yang menjadi *signifier* (penanda) dan *signified* (petanda) pembentuk makna itu? Siapa yang terlibat dalam proses pemaknaan tersebut? Penulisan ini bertujuan mengelaborasi jawaban-jawaban di atas yang nantinya dikaitkan dengan model dalam paradigma historiografi-radikalistik yang mendominasi makna kesejarahan Islam di Minangkabau abad ke-19.

McWilliam dalam "Mapping With Metaphor: Cultural topographies in West Timor" menunjukkan hasil kajiannya terhadap konstruksi budaya di suku Meto, Timor bagian barat. Ia menemukan penggunaan kiasan atau metafora untuk menginformasikan wacana sosial dan nama tempat tertentu yang berasal dari sejarah tutur/ lisan mereka. Bahasa puitis dalam kiasan menjadi penanda penting atas pengetahuan penamaan tempat, sekaligus proses pembentukan dan penegasan identitas serta status kelompok yang menguasai satu wilayah di Timor bagian barat. Pada bahasa kiasan itu terdapat klaim atas tanah dan wilayah tertentu yang didukung narasi sejarah asal usul, aliansi politik, dan jalur kekeluargaan tertentu. McWilliam menegaskan makna kekuasaan atas satu daerah dalam masyarakat Meto dibentuk secara sadar dalam kiasan, dimana keluarga-keluarga awal atau utama terlibat aktif dalam proses pemaknaan tersebut secara dominan.

Adapun *Shunya Yoshimi* "Consuming America, From Symbol to System" melakukan studi dengan fokus pada politik budaya Tokyo Disneyland (TDL) yang mencoba membentuk karakter ke-amerika-an orang Jepang kontemporer. Menurut Yoshimi, budaya konsumsi nilai-nilai ke-amerika-an oleh orang Jepang dengan keberadaan simbol Amerika di negeri ini bermula pada penempatan Amerika sebagai simbol penting atas wacana "kekayaan", "kebaruan", "emansipasi", dan "perlawanan" terutama dalam kalangan generasi muda Jepang. Meski terdapat riak dalam proses pemaknaan itu, namun TDL dihidupi oleh generasi baru Jepang yang lahir pasca PD II. Mereka yang secara sistemik mengonsumsi ke-Amerika-an itu sebagai identitas diri atau dalam bahasa lain terkoloni oleh TDL. Yoshimi menunjukkan proses pemaknaan menjadi Amerika menjadi unik ketika generasi pengonsumsi budaya asing ini tidak membentuk karakter copy-paste dari orang-orang dari Abang Sam ini. Sebaliknya menurut Yoshimi mereka tetap menjadi Jepang namun dalam warna Amerika.

Sementara Hilmar Farid dalam "The Malay question in Indonesia" menarik relasi sejarah bahasa Melayu menjadi Bahasa Indonesia sebagai salah satu basis pembentukan bangsa. Farid secara retorik mengajukan permasalahan kenapa makna kemelayuan tidak menjadi wacana nasionalisme penting, meski bahasa ini

telah lama diakui sebagai *lingua franca* kawasan dan dipakai sehari-hari sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Ia menemukan penandaan kemelayuan sebagai makna yang coba dimasukkan dalam wacana kebangsaan tidak mendapat dukungan dalam prosesnya. Para nasionalis tampak enggan menempatkan kemelayuan sebagai penanda gerakan kebangsaan, dan memilih istilah baru yang *to the point* atas tujuan perjuangan, yakni Bahasa Indonesia. Keengganan para nasionalis Indonesia mendeklarasikan Bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, dijelaskan Farid tersebut karena makna Melayu-Raya terlalu kecil sebagai proyek pembentukan identitas baru masyarakat Hindia-Belanda pasca kolonialisme. Selain itu asosiasi Islam dengan Melayu relatif dianggap para nasionalis akan mengganggu penguatan identitas Indonesia yang Multi-etnis dan agama. Jadi Farid menegaskan hilangnya makna kemelayuan dalam wacana keindonesiaan tersebut tidak diberi peluang oleh para nasionalis pasca Sumpah Pemuda 1928, bahkan sampai hari ini.

Tanda-tanda yang dibaca dalam tiga karya di atas merupakan model yang dapat membaca makna historiografi dominan tentang Islam di Minangkabau abad ke-19. Narasi besar Islam di Minangkabau abad ke-19 sebagai periode penuh kekerasan yakni Era Perang Padri, dibentuk dalam perspektif kolonialisme. Hampir seluruh model historiografi Indonesia yang diproduksi tentang masa ini mengesankan bahwa seluruh orang-orang Minangkabau yang hidup dalam tradisi Surau merupakan pengikut Padri atau paham Wahabisme yang tidak toleran terhadap adat istiadat setempat (Abdullah, 1966; Dobbin, 1974, 2008, 2016; Razi, 2016; Rozi, 2017; Santi et al., 2016; Sanusi, 2018; Schrieke, 1973; Zubir & Zayzda, 2017a). Model historiografi ini menjadi legitimasi pemaknaan proses radikalisme yang melanda kaum ulama Surau di Minangkabau sejak awal abad ke-19, sekaligus menunjukkan peran keberadaan gagasan kolonialisme di dalamnya.

Kolonialisme sebagai sistem kekuasaan, tidak semata merujuk pada era berkuasanya Pemerintahan Belanda di Nusantara sepanjang periode 1900-1942. Ia juga sebuah pemaknaan diskursif dengan strategi prosesi materialistis, relasional, mentalitas, dan metafungsi tekstual yang dilakukan aktor-aktornya dalam melawan atau menanamkan norma tertentu secara massal. Ideologi ini dalam khazanah historiografi Indonesia dibentuk oleh struktur ruang gagasan para sejarawan, baik dalam negeri sendiri, maupun sejarawan asing. Ideologi ini dikukuhkan dalam narasi sejarah resmi yakni historiografi yang diproduksi secara akademik, misal skripsi, tesis, disertasi atau artikel jurnal, dan buku-buku terbitan negara atau partikelir. Maka dari itu, ketika proses dekoloni mengambil tempat dalam sejarah Republik pada awal 1950, namun mentalitas akan kolonialisme ternyata tidak terkikis (de-kolonialisasi) seiring berpisahnya negeri jajahan dari negeri induk, dan hal ini bisa tampak pada (re)produksi historiografi Indonesia pasca kemerdekaan yang bersifat pseudo-kritis dan Indonesiasentrisme (Purwanto, 2001).

Makna pseudo-kritis dalam historiografi pemikiran Islam di Minangkabau abad ke-19 dibentuk historiografi Indonesia-sentrisme, konsumerisme akademik, dan pewacanaan kebangsaan. Tiga proses ini membentuk keberadaan makna pseudokritis atas sejarah Indonesia-sentrisme yang telah terbentuk dalam seminar sejarah tahun 1957. Hasil seminar ini kemudian menginisiasi proyek historiografi negara dalam bentuk penulisan buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) sebanyak enam jilid (KWARTANADA et al., 2018). Historiografi inisiasi seminar ini melahirkan karya-karya yang berusaha membalik perspektif penulis sejarah Belanda, yakni menjadikan aktor-aktor sejarah bumiputera menjadi pahlawan dalam relasinya melawan pemerintah kolonial sejak abad ke-17.

Sementara pada Seminar Nasional III pada 1981, melalui panel khusus yakni Sejarah Lokal, narasi pelokalan diberi tempat untuk dimunculkan (Kebudayaan, 1982). Tujuan sejarah lokal adalah mencari rumusan tentang “berbagai kisah di kelampauan dari kelompok atau kelompok-kelompok masyarakat yang berada pada “daerah geografis” yang terbatas” (Abdullah, 1982). Sebagai model penulisan sejarah lokal dimaksud, Taufik Abdullah yang merupakan salah seorang sejarawan berpengaruh kala itu menyunting satu buku dengan judul “Sejarah Lokal di Indonesia: Kumpulan Tulisan” (Abdullah, 1996). Buku ini berisi delapan artikel yang ditulis sejarawan asing/ Belanda tentang berbagai respons kaum Bumiputera terhadap kekuasaan kolonial Belanda. Salah satu karya yang dimuat adalah karangan H.A Steyn Parve, “Kaum Padari (Padri) di Padang Darat Pulau Sumatera”. Karya ini pertama kali terbit pada 1855, kira-kira dua puluh lima tahun setelah Perang Paderi berakhir. Karangan ini sangat kuat membawa makna kolonialisme karena si penulis sendiri merupakan bagian dari struktur dominan kala itu (*ruler/colonizer*). Model dan tema penulisan sejarah lokal sumbangan seminar nasional 1981 ini menjadi contoh penulisan karya-karya akademik di berbagai kampus di Indonesia, seperti UI, UGM, UNPAD, Unand, Unhas, dan umumnya perguruan tinggi yang mengajarkan kesarjanaan sejarah.

Historiografi dapat dipahami dalam gagasan Mc William (McWilliam, 2006) sebagai sarana referensi atau peta pengetahuan yang membentuk satu sistem epistemologi pembelajar sejarah, baik di ranah akademik maupun publik, dimana orang-orang ditempatkan dan berafiliasi dalam pemaknaan tunggal, serta disebarkan melalui berbagai jaringan akademik, baik secara institusional, maupun individual (jaringan sejarawan berupa dosen-mahasiswa). Maka dari itu, karya Steyn Parve sebagai model historiografi pseudo-kritis sangat kuat membentuk pemaknaan radikalisme kaum Surau di Minangkabau yang saat bersamaan terjadi peristiwa gerakan Padri. Karya akademik seperti (Amran, 1981; Barnes et al., 1982; Dobbin, 1974; Hadler, 2008; Hull, 1830; Mansoer et al., 1970; Martamin, 1984; Poesponegoro & Notosusanto, 2008) merupakan pembentuk makna akan radikalisme kaum Surau. Mereka merupakan para sejarawan berpengaruh yang menjadi dosen pembimbing para penulis periode berikutnya, baik langsung maupun tidak melalui proses sitasi karya. Dampak luas atas proses pemaknaan radikalisme kaum Surau di Minangkabau abad ke-19 tersebut sangat dominan

dalam historiografi yang diproduksi periode kemudian. Di antara karya-karya tersebut adalah (A'La, 2008; Alfida, 2015a, 2015b; Baskara, 2017; Hati, 2018; Ismail et al., 2020; Murkilim, 2017; Nashir, 2008; Razi, 2016; Rozi, 2017; Santi et al., 2016; Sanusi, 2018; Setiawan, 2018; Subroto, 2015; Yetti, 2008; Zubir & Zayzda, 2017b; Zwart, 2020), dan banyak lagi.

Karya-karya historiografi di atas membentuk model historiografi sejarawan lokal yang mengikuti narasi radikalisme kelompok Surau di Minangkabau abad ke-19. Ruang kesadaran yang diskursif dalam struktur metodologi sejarah yang menghasilkan pelbagai historiografi radikalisme kaum surau merupakan apa yang dapat diasosiasikan sebagai “artefak impor” (Yoshimi, 1998). Sebagai artefak impor, dalam konteks ini karya sejarah sejarawan lokal mesti mensitasi sejarawan asing dan menggunakan arsip kolonial bila ingin menempatkan historiografinya sebagai “ilmiah” dan “serius”. Simbol karya “ilmiah” dan “serius” itu dikonsumsi dalam berbagai kegiatan kesejarahan (diskusi, reproduksi penelitian, materi ajar di institusi edukasi), dan diperkuat dalam narasi kebangsaan. Menjadi “karya ilmiah” merupakan salah satu destinasi historiografi yang coba dikembangkan para sejarawan. Sejarah bagi sebagian mereka masih berada pada wilayah abu-abu dalam ruang ilmu pengetahuan. Maka dari itu, jawaban apakah karya seorang sejarawan dapat dinilai dalam level “ilmiah” dan “serius”, maka sangat penting kerja metodologi mereka dikreasikan dalam makna kebangsaan atau Keindonesiaan (Farid, 2017).

Daftar Pustaka

- Abdullah, T. (1966). Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau. *Indonesia*, 2(October).
- Abdullah, T. (1982). Di Sekitar Sejarah Lokal di Indonesia. In *Seminar Sejarah Nasional III; Panel Sejarah* (pp. 1–46). P&K.
- Abdullah, T. (Ed.). (1996). *Sejarah Lokal di Indonesia* (Keempat). UGM Press.
- Ahimsa-Putra, S. H. (2011). BAHASA SEBAGAI MODEL STUDI KEBUDAYAAN DI INDONESIA - ANTROPOLOGI STRUKTURAL DI INDONESIA. *Masyarakat Indonesia*, XXXVII(1).
- A'La, A. (2008). The genealogy of muslim radicalism in Indonesia: A study of the roots and characteristics of the padri movement. *Journal of Indonesian Islam*, 2(2), 267–299. <https://doi.org/10.15642/jiis.2008.2.2.267-299>
- Alfida, A. (2015a). Syair Fasih Saghir: Sosial Status dan Ritual Kematian di Minangkabau Abad ke-19. *Manuskripta*, Vol 5 No 2 (2015): *Manuskripta*, 197–235. <http://journal.perpusnas.go.id/index.php/manuskripta/article/view/42/39>

- Alfida, A. (2015b). Syair Fasih Saghir: Sosial Status dan Ritual Kematian di Minangkabau Abad ke-19. *Manuskripta, Vol 5 No 2 (2015): Manuskripta*, 197–235.
<http://journal.perpusnas.go.id/index.php/manuskripta/article/view/42/39>
- Amran, R. (1981). *Sumatera Barat hingga Plakat Panjang*. Sinar Harapan.
- Barnes, R. H., Graves, E. E., & Kato, T. (1982). The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule in the Nineteenth Century. *Pacific Affairs*, 55(3).
<https://doi.org/10.2307/2757154>
- Baskara, B. (2017). Islamic Puritanism Movements in Indonesia as Transnational Movements. *DINIKA: Academic Journal of Islamic Studies*, 2(1).
<https://doi.org/10.22515/dinika.v2i1.103>
- Dobbin, C. (1974). Islamic Revivalism in Minangkabau at the Turn of the Nineteenth Century. *Modern Asian Studies*, 8(3).
<https://doi.org/10.1017/S0026749X00014669>
- Dobbin, C. (2008). *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Paderi Minangkabau 1784-1847*. Komunitas Bambu.
- Dobbin, C. (2016). Islamic revivalism in a changing peasant economy: Central Sumatra, 1784-1847. In *Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra, 1784-1847*. Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781315398181>
- Fanani, F. (2013). Semiotika Strukturalisme Saussure. *Jurnal The Messenger*, 5(1).
<https://doi.org/10.26623/themessenger.v5i1.149>
- Farid, H. (2017). The Malay question in Indonesia. *Inter-Asia Cultural Studies*, 18(3).
<https://doi.org/10.1080/14649373.2017.1347986>
- Hadler, J. (2008). A historiography of violence and the secular state in Indonesia: Tuanku Imam Bondjol and the uses of history. In *Journal of Asian Studies*.
<https://doi.org/10.1017/S0021911808001228>
- Hati, P. C. (2018). DAKWAH PADA MASYARAKAT MINANGKABAU (STUDI KASUS PADA KAUM PADRI). *Islamic Communication Journal*, 3(1).
<https://doi.org/10.21580/icj.2018.3.1.2681>
- Hull, S. (1830). *Memoir Of The Life And Public Services Of Sir Thomas Stamford Raffles: Particularly in the Government of Java, 1811-1816, and of Bencoolen and Its Dependencies, 1817-1824; with Details of the Commerce and Resources of the Eastern Archipelago, and Selectio*. JOHN MURRAY, ALBEMARLE STREET.

- Ismail, I., Kamal, M., Derta, S., & Rezi, M. (2020). Strategic Roles Applied by Minangkabau Local Leaders in Preventing Religious Radicalism in West Sumatra. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 6(2).
https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v6i2.3291
- Kebudayaan, D. P. dan. (1982). *Seminar Sejarah Nasional III: Panel Sejarah Lokal*. P&K.
- KWARTANADA, D., LIE, R., & WIRAWAN, Y. (2018). Seminar Sejarah Nasional, Peringatan 60 tahun (1957-2017), Yogyakarta, Fakultas Ilmu Budaya, 14-16 Desember 2017. *Archipel*, 96. <https://doi.org/10.4000/archipel.738>
- Mansoer, M., Imran, A., Safwan, M., Idris, Z. A., & Bucari, S. I. (1970). *Sedjarah Minangkabau*. Bhratara.
- Martamin, M. (1984). *Tuanku Imam Bonjol*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- McWilliam, A. (2006). Mapping With Metaphor: Cultural topographies in West Timor. In *The Poetic Power of Place: Comparative Perspectives on Austronesian Ideas of Locality*.
<https://doi.org/10.22459/ppp.09.2006.06>
- Murkilim, M. (2017). NEW REVIVALISME ISLAM. *Nuansa*, 10(2). <https://doi.org/10.29300/nuansa.v10i2.651>
- Nashir, H. (2008). Purifikasi Islam dalam Gerakan Padri di Minangkabau. *Unisia*, 31(69), 219–230. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss69.art1>
- Poesponegoro, M. J., & Notosusanto, N. (Eds.). (2008). *Sejarah Nasional Indonesia* (V). Balai Pustaka.
- Purwanto, B. (2001). HISTORISISME BARU DAN KESADARAN DEKONSTRUKTIF: KAJIAN KRITIS TERHADAP HISTORIOGRAFI INDONESIASENTRIS*. *Humaniora*, 13(1).
- Razi, S. (2016). Dari Islam Radikal ke Islam Pluralis Genealogi Gerakan Paderi dan Pengaruhnya terhadap Islam Pluralis di Perbatasan Minangkabau. *Masyarakat Indonesia*. <http://jmi.ipisk.lipi.go.id/index.php/jmiipisk/article/view/240>
- Rozi, S. (2017). NEGOSIASI ISLAM KULTUR DALAM GERAKAN PADERI RAO DI SUMATERA TENGAH (1820-1833). *KALAM*, 6(1), 85.
<https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.396>

- Santi, M., Sukardi, S., & Ermarita, N. (2016). PERANAN BELANDA DALAM PERANG SAUDARA ANTARA KAUM PADRI DAN KAUM ADAT DI MINANGKABAU PADA ABAD KE-19. *Kalpataru: Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah*, 1(2). <https://doi.org/10.31851/kalpataru.v1i2.536>
- Sanusi, I. (2018). SEJARAH KONFLIK KEBANGKITAN ISLAM DI MINANGKABAU: Sebuah Tinjauan Awal Terhadap Proses Kemunculannya. *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 33–48. <https://doi.org/10.15548/khazanah.v0i0.13>
- Schrieke, B. (1973). *Pergolakan agama di Sumatera Barat: sebuah sumbangan bibliografi / oleh B.J.O. Schrieke ; diterjemahkan oleh Soegarda Poerbakawatja ; dengan kata pengantar oleh Taufik Abdullah*. Bhratara.
- Setiawan, I. (2018). TUANKU NAN RENCEH (1762-1832). *Diakronika*, 17(2). <https://doi.org/10.24036/diakronika/vol17-iss2/24>
- Subroto, K. (2015). TUANKU IMAM BONJOL & GERAKAN PADRI. *Lembaga Kajian Syamina, XVIII*(Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam dan Gerakan Padri).
- Yetti, E. (2008). Penulisan Sejarah Perang Padri Dalam Karya Sastra Melayu Sebuah Studi Bandingan. *ATAVISME*, 11(2). <https://doi.org/10.24257/atavisme.v11i2.332.25-34>
- Yoshimi, S. (1998). Consuming America, From Symbol to System. *Institute of Cultural Research Seminar*.
- Zubir, Z., & Zayzda, N. A. (2017a). Peta Konflik dan Konflik Kekerasan di Minangkabau Sumatera Barat. *Masyarakat Indonesia*, 36(1).
- Zubir, Z., & Zayzda, N. A. (2017b). Peta Konflik dan Konflik Kekerasan di Minangkabau Sumatera Barat. *Masyarakat Indonesia*, 36(1).
- Zwart, P. de. (2020). Globalisation, Inequality and Institutions in West Sumatra and West Java, 1800–1940. *Journal of Contemporary Asia*.